

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung
- Arba M., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika
- Hadi Soetrisno, 1993, *Metodologi Research*, jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta
- Hadikusuma Hilman, 1980, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Handoko Widhi, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta,
- Harsono Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tinja Mas, Jakarta
- Hutagalung Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta
- Mahmud Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- Mujiburohman Dian Aries, 2008, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Bhumi
- Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1999, *Politik Agraria nasional – Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, GAMA University Press, Yogyakarta
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Parlindungan A.P., 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan*

*Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)*, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung

Saleh K. Wantjik, 1984, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Santoso Urip, 2010 *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sihombing B.F, 2005, *Evolusi Kebijakan pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta

Soeloman B. Tanako dan Soerjono Soekanto, 1987, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

\_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Soepomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas Jakarta

Soerodjo Irawan, 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arloka, Surabaya

Sudiyat Iman, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta

Sumardjono Maria S.W., 2014, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada

Sugangga I.G.N., 1995, *Hukum waris Adat*, CV. Sumber Karya, Semarang

Sutanto Retnowulan, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju

Sutedi Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-1, Jakarta

Ruchyat Edy, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi*, Alumni, Bandung

Wirgnjodipoero Soetojo, 1987, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta

Wiwiek Wibowo dan Liliana Tedjosaputro, 1989, *Hukum Waris AB-Intestato*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

## **B. Wawancara**

Andi Arief Sanjaya, S.E,M.AK, Kepala urusan umum dan kepegawaian, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 17 Maret 2020

H Iwan Purnawan, SH, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Tanggal 19 maret 2020

Ilham Akbar Maruapey, Selaku Staff Pengukuran, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 20 April 2020

I Putu Mahendra Pratama, S.H, Kepala Sub seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 7 April 2020

I Gde Beniyasa, S.ST,M.H, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 7 April 2020

Mila Karmila, selaku Staf Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Tanggal 7 April 2020

Mizanul Kirom, S.H, Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Tanggal 19 Maret 2020

Muhammad Ahyar Rosadi, S.H, selaku Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 19 Maret 2020

Muhamad Al Farid, S.H, Kepala Sub Seksi Penangan Sengketa dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Tanggal 19 Maret 2020

Muhammad Elan Naafi, S.H, Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data, Hak Tanah dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa barat, tanggal 1 April 2020

Muhammad Irfani Bramantio, SH, selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 17 Maret 2020

Muhlis, Warga desa Telaga bertong, Kabupaten Sumbawa Barat, pada tanggal 28 April 2020

Rahayu Kusuma Astuti, Selaku Staf Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa barat, tanggal 17 Maret 2020

Samsul Hidayat, S.H, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 17 Maret 2020

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Aditya Christy H, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Untuk Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang” Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018

Annisa Turi Hardianingsih, “Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kutai Kartanegara” Tesis, Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019

Desi Andriani, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”, Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018

Rizal Effendi, “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung)” Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

Soemali, *Perkawinan Adat Sumbawa Dan Permasalahan Hak Waris Bila Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2011

#### **D. Majalah**

Abdul Aziz, *Jurus Cepat Bagi-bagi Sertifikat Tanah Ala Jokowi*, Abdul Aziz .tirto.id, *Artikel* 22-12-2016, diakses pada tanggal 25 Mei 2019, Pukul : 02.00 WITA

Hasil Seminar Hukum Pertanahan (Hukum dan Keadilan, Majalah Hukum Pradin, No. 1 Tahun Ke-IV, Mei-Juni 1978) dalam Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Edisi Pertama, Certakan Pertama, Yogyakarta, Liberty

I Gusti Nyoman Guntur, 2017, *Sertifikat Tanah Massa: Peluang dan Tantangan (Menuju Pendaftaran Yang Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah)*, Makalah

Oloan Sitorus, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendaftaran tanah*", Makalah, 9 November 2017.

Tamtomo JP, 2017, *Cacah Agraria dan Hak Dasar Rakyat*, Kompas

#### **E. Internet**

Lintas NTB <https://lintasntb.com/2019/08/07/bpn-ksb-akan-tuntaskan-program-ptsl-di/>, diakses Pada Tanggal 22 Januari 2020, Pukul 00.20

Sukmadinata, "Metodologi-penelitian-hukum-2/", <https://idtesis.com/> diakses pada tanggal 7 Januari 2020 pada pukul 19:41 WIB